

RELEVANSI GAGASAN SOEKARNO "TO BUILD THE WORLD ANEW" DALAM MENGHADAPI KRISIS GEOPOLITIK GLOBAL KONTEMPORER

The Relevance of Soekarno's Idea "To Build the World Anew" in Facing the Contemporary Global Geopolitical Crisis

Santyo Widayatmo
Julia Bea Kurniawaty
Universitas Indraprasta PGRI
Santyow13@gmail.com
Julia_bea@yahoo.com

ABSTRAK: Transformasi geopolitik global pada abad ke-21 ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, munculnya tatanan dunia multipolar, konflik bersenjata antarnegara, krisis energi, ketimpangan ekonomi global, serta ancaman perubahan iklim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem internasional masih menghadapi berbagai persoalan struktural yang menghambat terwujudnya perdamaian dan keadilan global. Dalam konteks tersebut, pemikiran Presiden Soekarno yang tertuang dalam pidato To Build the World Anew yang disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960 kembali memperoleh relevansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi gagasan Soekarno dalam menghadapi krisis geopolitik global kontemporer. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan geopolitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Soekarno mengenai anti-kolonialisme, anti-imperialisme, kesetaraan kedaulatan negara, solidaritas Global South, reformasi tata dunia internasional, dan perdamaian dunia masih memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini. Pemikiran tersebut dapat menjadi dasar konseptual bagi Indonesia dalam memperkuat politik luar negeri bebas aktif dan memainkan peran sebagai middle power dalam tatanan dunia multipolar.

Kata kunci: Soekarno, To Build the World Anew, geopolitik, Global South, multipolaritas.

ABSTRACT: Global geopolitical transformation in the twenty-first century has been characterized by intensifying great-power rivalry, the emergence of a multipolar world order, interstate armed conflicts, energy crises, global economic inequality, and climate change. These developments indicate that the international system continues to face structural challenges that hinder the realization of global peace and justice. In this context, the ideas of President Sukarno as articulated in his 1960 United Nations General Assembly Speech to Build the World Anew have regained significance. This study aims to analyze the relevance of Sukarno's ideas in addressing contemporary geopolitical crises. Using a normative legal research method with historical, conceptual, and geopolitical approaches, this study finds that Sukarno's ideas concerning anti-colonialism, anti-imperialism, sovereign equality of states, Global South solidarity, reform of international governance, and world peace remain highly relevant in contemporary global politics. These ideas may serve as a conceptual foundation for Indonesia in strengthening its independent and active foreign policy and enhancing its role as a middle power in an increasingly multipolar international order.

Keywords: Sukarno, To Build the World Anew, geopolitics, Global South, multipolarity

LATAR BELAKANG

Perubahan konfigurasi politik internasional pada abad ke-21 menunjukkan bahwa dunia sedang mengalami transformasi besar menuju tatanan geopolitik yang semakin kompleks. Berakhirnya Perang Dingin yang semula memunculkan dominasi Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan global kini mulai bergeser dengan munculnya berbagai kekuatan baru seperti Tiongkok, India, Rusia, Brasil, dan negara-negara anggota BRICS lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan kecenderungan menuju sistem multipolar yang ditandai dengan distribusi kekuatan yang lebih tersebar dibandingkan periode sebelumnya (Acharya, 2014).

Di sisi lain, perkembangan geopolitik global juga diwarnai oleh berbagai krisis multidimensional. Konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, rivalitas strategis Amerika Serikat dan Tiongkok, konflik di Timur Tengah, krisis energi, ketimpangan ekonomi global, serta ancaman perubahan iklim menjadi indikator bahwa sistem internasional masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang berpotensi mengganggu stabilitas dunia.

Dalam kondisi demikian, berbagai negara berkembang mulai mengkaji kembali gagasan-gagasan alternatif yang dapat menjadi dasar bagi pembangunan tata dunia yang lebih adil dan inklusif. Salah satu pemikiran yang kembali memperoleh perhatian adalah gagasan Presiden Soekarno yang tertuang dalam pidato *To Build the World Anew* yang disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 30 September 1960.

Pidato tersebut merupakan salah satu karya intelektual politik paling penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Soekarno tidak hanya mengkritik struktur internasional yang dianggap tidak adil, tetapi juga menawarkan visi mengenai tata

dunia baru yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan sosial, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan solidaritas antarbangsa. UNESCO bahkan menetapkan arsip pidato tersebut sebagai bagian dari *Memory of the World Register* karena kontribusinya terhadap pemikiran global mengenai perdamaian, dekolonisasi, dan hubungan internasional. Meskipun pidato tersebut disampaikan lebih dari enam dekade yang lalu, berbagai gagasan yang terkandung di dalamnya tampak masih relevan dengan berbagai persoalan geopolitik yang dihadapi dunia saat ini. Fenomena kebangkitan *Global South*, tuntutan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meningkatnya kritik terhadap ketimpangan ekonomi global, serta munculnya dunia multipolar menunjukkan bahwa isu-isu yang pernah dikemukakan Soekarno masih menjadi perdebatan penting dalam hubungan internasional kontemporer.

Lumumba-Kasongo (2015) menegaskan bahwa semangat Bandung yang dipelopori Soekarno masih memiliki relevansi dalam menghadapi dominasi globalisasi neoliberal dan ketimpangan internasional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas negara berkembang tetap menjadi fondasi penting dalam perjuangan *Global South*.

Sementara itu, Acharya (2014) menjelaskan bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan pasca-hegemoni Amerika Serikat yang ditandai oleh munculnya berbagai pusat kekuatan baru. Dalam konteks tersebut, negara-negara berkembang memiliki peluang yang lebih besar untuk memainkan peran strategis dalam hubungan internasional.

Penelitian terbaru oleh Umar, Yuana, Hakim, dan Mas'ood (2025) mengenai peringatan 70 tahun Konferensi Bandung menunjukkan bahwa visi dekolonisasi,

keadilan global, dan kesetaraan internasional yang diperjuangkan Soekarno masih menjadi agenda penting dalam dunia multipolar saat ini. Akan tetapi, penelitian tersebut belum secara spesifik menghubungkan gagasan *To Build the World Anew* dengan krisis geopolitik global kontemporer.

Dengan demikian, terdapat ruang akademik yang masih terbuka untuk mengkaji relevansi pidato *To Build the World Anew* dalam konteks transformasi geopolitik abad ke-21.

Dari uraian di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada relevansi pemikiran Soekarno yang tertuang dalam pidato *To Build the World Anew* terhadap dinamika geopolitik global abad ke-21. Meskipun pidato tersebut disampaikan pada tahun 1960 dalam konteks Perang Dingin dan perjuangan dekolonisasi, berbagai isu yang dikemukakan Soekarno, seperti anti-kolonialisme, anti-imperialisme, kesetaraan kedaulatan negara, solidaritas negara-negara berkembang, reformasi tata dunia internasional, dan perdamaian dunia, tampak masih memiliki keterkaitan dengan berbagai tantangan global saat ini. Krisis geopolitik kontemporer yang ditandai oleh rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, munculnya tatanan dunia multipolar, menguatnya peran BRICS dan *Global South*, konflik bersenjata antarnegara, ketimpangan ekonomi global, serta tuntutan reformasi lembaga-lembaga internasional menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana gagasan Soekarno masih dapat digunakan sebagai landasan konseptual dalam memahami dan merespons perubahan tatanan dunia saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama Bagaimana relevansi gagasan Soekarno dalam pidato *To Build the World Anew* terhadap krisis geopolitik global kontemporer? Pertanyaan ini menjadi penting untuk menjelaskan kontribusi

pemikiran Soekarno dalam konteks hubungan internasional modern sekaligus menilai potensinya sebagai paradigma alternatif dalam mewujudkan tata dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

METODA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap konsep, nilai, asas, dan gagasan yang terkandung dalam suatu pemikiran atau dokumen, termasuk pidato politik yang memiliki dimensi normatif dalam hubungan internasional. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer berupa pidato *To Build the World Anew* serta berbagai literatur ilmiah yang membahas pemikiran politik dan kebijakan luar negeri Soekarno.

1. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang lahirnya pidato *To Build the World Anew* yang disampaikan Soekarno pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960. Pidato tersebut muncul dalam konteks Perang Dingin ketika dunia terpolarisasi ke dalam Blok Barat dan Blok Timur. Pada masa tersebut, Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno berupaya membangun posisi politik luar negeri yang independen melalui prinsip anti-kolonialisme dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika. Menurut Indrayani dan Umar (2020), dinamika politik internasional pada era Soekarno sangat dipengaruhi oleh perjuangan mempertahankan kedaulatan nasional serta upaya menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam percaturan global. Orientasi politik luar negeri Indonesia pada masa itu berkembang dari

diplomasi menuju sikap yang lebih konfrontatif terhadap kekuatan-kekuatan yang dianggap mewakili kolonialisme dan imperialisme.

Selain itu, penelitian Wijanarko menunjukkan bahwa pidato-pidato Soekarno pada periode 1958–1965 secara konsisten menggambarkan visi tentang tatanan dunia baru yang didasarkan pada kemerdekaan bangsa-bangsa, persahabatan internasional, solidaritas, dan penolakan terhadap dominasi kekuatan besar. Visi tersebut menjadi landasan penting dalam memahami konteks historis lahirnya pidato *To Build the World Anew*.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis gagasan-gagasan utama yang terkandung dalam pidato *To Build the World Anew*, seperti anti-kolonialisme, anti-imperialisme, solidaritas internasional, serta reformasi tata dunia. Dalam pidatonya, Soekarno menolak dominasi ideologi besar dunia yang direpresentasikan oleh kapitalisme Barat maupun komunisme Timur, serta menawarkan alternatif berupa tatanan dunia yang lebih adil bagi bangsa-bangsa yang baru merdeka.

Penelitian Yeremia menjelaskan bahwa anti-kolonialisme merupakan salah satu fondasi utama dalam diskursus politik luar negeri Soekarno. Melalui berbagai pidato internasionalnya, Soekarno secara konsisten mengonstruksikan kolonialisme sebagai sumber ketidakadilan global dan menempatkan perjuangan bangsa-bangsa terjajah sebagai agenda utama politik internasional Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian terbaru oleh Vasileiou (2025) menunjukkan bahwa pemikiran anti-kolonial Soekarno tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga

mengandung visi *worldmaking* atau pembentukan tatanan dunia baru. Menurut penelitian tersebut, gagasan Soekarno mencakup dimensi diskursif, institusional, dan simbolik yang bertujuan menciptakan sistem internasional pasca kolonial yang tidak didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar dunia.

3. Pendekatan Geopolitik (*Geopolitical Approach*)

Pendekatan geopolitik digunakan untuk mengevaluasi relevansi gagasan Soekarno dalam konteks hubungan internasional kontemporer. Pendekatan ini melihat bagaimana konsep anti-kolonialisme, solidaritas *Global South*, dan reformasi tata dunia masih memiliki signifikansi dalam menghadapi ketimpangan kekuasaan global pada abad ke-21.

Dalam kajian mengenai pidato-pidato Soekarno, Wijanarko menyimpulkan bahwa visi dunia baru yang dibangun Soekarno berangkat dari gagasan kemandirian bangsa-bangsa berkembang dan kerja sama internasional yang setara. Gagasan tersebut memiliki relevansi dengan berbagai isu kontemporer, seperti ketidaksetaraan dalam tata kelola global, representasi negara berkembang dalam lembaga internasional, serta tuntutan reformasi organisasi-organisasi internasional.

Sementara itu, penelitian Vasileiou menegaskan bahwa pemikiran anti-kolonial Soekarno dapat dipahami sebagai kritik terhadap struktur kekuasaan global yang masih mencerminkan warisan kolonial. Oleh karena itu, gagasan Soekarno mengenai pembentukan tatanan dunia yang lebih adil tetap relevan untuk menganalisis dinamika geopolitik kontemporer, terutama dalam

hubungan antara negara-negara *Global South* dan negara-negara maju.

PEMBAHASAN

Konteks Historis Pidato *to Build the World Anew*

Untuk memahami relevansi gagasan Soekarno terhadap krisis geopolitik kontemporer, penting terlebih dahulu memahami konteks historis lahirnya pidato *To Build the World Anew*. Pidato tersebut disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-15 tanggal 30 September 1960, ketika dunia berada dalam ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet.

Pada masa itu, sebagian besar negara Asia dan Afrika baru memperoleh kemerdekaan dari kolonialisme Eropa. Namun, kemerdekaan politik tidak serta-merta menghilangkan ketergantungan ekonomi dan politik terhadap negara-negara maju. Soekarno melihat bahwa sistem internasional yang dibangun pasca-Perang Dunia II masih mempertahankan ketimpangan struktural yang menguntungkan negara-negara besar.

Dalam pidatonya, Soekarno mengkritik paradigma internasional yang hanya bertumpu pada konflik ideologi kapitalisme dan komunisme. Menurutnya, persoalan utama dunia bukan semata-mata pertentangan ideologi, melainkan ketidakadilan global yang bersumber dari kolonialisme, imperialisme, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan pembangunan. Pidato tersebut menjadi manifestasi intelektual dari semangat Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 yang menekankan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, kerja sama internasional dan penolakan kolonialisme dan imperialisme. Gagasan tersebut kemudian menjadi fondasi

Gerakan Non-Blok dan diplomasi *Global South* yang terus berkembang hingga saat ini

Pokok-Pokok Gagasan Soekarno dalam *To Build the World Anew*

1. Anti-Kolonialisme dan Anti-Imperialisme

Salah satu gagasan utama Soekarno adalah penolakan terhadap kolonialisme dalam segala bentuknya. Menurut Soekarno, kolonialisme tidak berakhir ketika suatu bangsa memperoleh kemerdekaan politik. Kolonialisme dapat berubah bentuk menjadi dominasi ekonomi, budaya, teknologi, dan politik yang dikenal sebagai neo-kolonialisme.

Dalam perspektif kontemporer, gagasan ini sangat relevan. Ketergantungan negara berkembang terhadap teknologi, investasi, utang luar negeri, dan rantai pasok global menunjukkan bahwa relasi dominasi masih terjadi meskipun tidak lagi berbentuk penjajahan teritorial.

2. Kesetaraan Kedaulatan Negara

Soekarno menegaskan bahwa setiap negara, besar maupun kecil, memiliki hak yang sama dalam sistem internasional. Prinsip ini sejalan dengan konsep *sovereign equality of states* yang tercantum dalam Piagam PBB.

Namun dalam praktiknya, hubungan internasional sering kali masih didominasi oleh negara-negara besar yang memiliki kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi yang lebih unggul. Oleh karena itu, perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan internasional tetap menjadi agenda yang relevan hingga saat ini.

3. Solidaritas Bangsa - Bangsa Berkembang

Soekarno memandang bahwa negara-negara yang pernah mengalami kolonialisme memiliki kepentingan bersama dalam memperjuangkan keadilan global. Solidaritas tersebut

diwujudkan melalui kerja sama Asia-Afrika dan kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok.

Saat ini, semangat solidaritas tersebut dapat ditemukan dalam berbagai forum *Global South* seperti BRICS, G77, dan *South-South Cooperation*.

4. Reformasi Tata Dunia

Soekarno menilai bahwa struktur internasional yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan mayoritas umat manusia. Oleh karena itu, ia menyerukan perlunya pembangunan tata dunia baru yang lebih demokratis dan inklusif. Gagasan tersebut menjadi salah satu warisan intelektual paling penting dari pidato *To Build the World Anew*.

Krisis Geopolitik Global Kontemporer

1. Transisi Menuju Tatanan Dunia Multipolar

Salah satu fenomena paling penting dalam geopolitik abad ke-21 adalah transisi dari sistem unipolar menuju sistem multipolar. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya kekuatan global dominan. Namun, dalam dua dekade terakhir, dominasi tersebut mulai mengalami tantangan dari berbagai kekuatan baru seperti : Tiongkok, India, Rusia, Brasil, Afrika Selatan dan negara-negara Teluk. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat telah mengubah distribusi kekuatan global. Saat ini Tiongkok tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga kekuatan teknologi, militer, dan diplomatik yang berpengaruh. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem multipolar yang lebih kompleks dibandingkan masa Perang Dingin.

Soekarno sejak awal menolak dominasi satu kekuatan terhadap kekuatan lainnya. Ia membayangkan dunia yang terdiri atas bangsa-bangsa merdeka

yang memiliki kedudukan setara. Dalam konteks multipolaritas, gagasan tersebut memperoleh relevansi baru karena semakin banyak negara yang menuntut distribusi kekuatan global yang lebih seimbang.

2. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan isu geopolitik paling dominan pada abad ke-21. Persaingan tersebut meliputi bidang ekonomi ; perang dagang antara kedua negara menunjukkan bahwa kompetisi global tidak lagi hanya bersifat militer, tetapi juga ekonomi dan juga teknologi; persaingan dalam bidang kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, teknologi 5G, keamanan siber, menjadi arena baru geopolitik global.

3. Indo-Pasifik

Kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat persaingan strategis karena memiliki jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Soekarno mengingatkan bahaya dunia yang terjebak dalam politik blok. Saat ini, banyak negara berkembang menghadapi tekanan untuk memilih antara Amerika Serikat atau Tiongkok. Dalam situasi tersebut, prinsip bebas aktif yang diwariskan Soekarno menjadi semakin relevan karena memungkinkan negara mempertahankan independensi kebijakan luar negerinya.

4. Konflik Rusia-Ukraina dan Kembalinya Politik Kekuatan Besar

Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa perang antarnegara masih menjadi instrumen politik internasional. Dampak konflik tersebut meliputi krisis energi global, kenaikan harga pangan, gangguan rantai pasok internasional dan meningkatnya ketegangan NATO-Rusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia belum sepenuhnya berhasil mewujudkan sistem keamanan kolektif yang efektif.

Relevansi Pemikiran Soekarno; Soekarno menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Prinsip tersebut tetap menjadi dasar penting dalam menjaga stabilitas internasional.

5. Perubahan Iklim sebagai Isu Geopolitik

Perubahan iklim kini tidak lagi sekadar isu lingkungan, melainkan juga isu geopolitik. Dampaknya mencakup migrasi lintas negara, konflik sumber daya, ketahanan pangan, keamanan energy dan ancaman terhadap negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Relevansi Pemikiran Soekarno; gagasan Soekarno mengenai solidaritas internasional dapat menjadi dasar moral bagi kerja sama global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Global South Dan Kebangkitan Brics

1. Global South sebagai Aktor Baru

Global South merujuk pada kelompok negara berkembang yang memiliki pengalaman historis kolonialisme dan ketimpangan pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara *Global South* menunjukkan peningkatan pengaruh dalam politik internasional. Faktor pendorongnya meliputi pertumbuhan ekonomi, peningkatan populasi, sumber daya alam serta kerja sama regional. Fenomena ini menunjukkan bahwa pusat gravitasi ekonomi dunia mulai bergeser dari Utara ke Selatan.

2. BRICS dan Perubahan Struktur Kekuatan Dunia

BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan, serta anggota baru yang bergabung setelah 2023 menunjukkan munculnya

alternatif terhadap dominasi ekonomi Barat. BRICS berupaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, memperkuat penggunaan mata uang lokal; mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS serta memperjuangkan reformasi lembaga internasional.

Dari uraian tersebut maka Relevansi terhadap Pemikiran Soekarno adalah apa yang diperjuangkan BRICS memiliki kemiripan dengan aspirasi yang pernah disampaikan Soekarno yaitu kesetaraan global, keadilan ekonomi, pengurangan dominasi negara besar serta solidaritas negara berkembang. Dengan demikian, kebangkitan BRICS dapat dipandang sebagai salah satu manifestasi modern dari semangat Bandung.

Reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Tata Dunia Baru

1. Kritik terhadap Struktur PBB

Salah satu kritik utama terhadap PBB adalah struktur Dewan Keamanan yang masih mencerminkan konfigurasi kekuatan pasca-Perang Dunia II. Hak veto yang dimiliki lima anggota tetap sering dianggap tidak demokratis, tidak representative, dan menghambat penyelesaian konflik internasional. Akibatnya, banyak negara berkembang merasa tidak memiliki representasi yang memadai dalam pengambilan keputusan global.

2. Relevansi Gagasan Soekarno,

Soekarno telah mengkritik ketimpangan tersebut sejak tahun 1960. Ia menghendaki sistem internasional yang lebih demokratis, representasi yang lebih luas serta kesetaraan antarbangsa. Saat ini tuntutan reformasi PBB kembali menguat karena struktur yang ada dinilai tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

3. Indonesia dan Reformasi Tata Dunia

Indonesia memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan reformasi global karena merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, anggota G20, negara terbesar di ASEAN serta memiliki warisan diplomatik Bandung dan Non-Blok. Dalam konteks ini, pemikiran Soekarno dapat menjadi sumber inspirasi bagi diplomasi Indonesia.

Implikasi bagi Politik Luar Negeri Indonesia

Pemikiran Soekarno mengenai anti-kolonialisme, solidaritas internasional, dan pembentukan tata dunia yang lebih adil masih memiliki relevansi dalam praktik diplomasi Indonesia saat ini. Gagasan yang tertuang dalam pidato *To Build the World Anew* dapat diaktualisasikan melalui berbagai kebijakan luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kemandirian, kerja sama global yang setara, serta perdamaian dunia.

1. Penguatan Politik Bebas Aktif: Indonesia Tetap Independen dari Rivalitas Kekuatan Besar

Prinsip politik luar negeri bebas aktif merupakan salah satu warisan penting pemikiran Soekarno yang hingga kini menjadi landasan diplomasi Indonesia. Dalam konteks persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia berupaya mempertahankan posisi independen dengan tidak memihak salah satu kekuatan besar, namun tetap aktif berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan internasional.

Menurut penelitian oleh Dewi Fortuna Anwar, politik bebas aktif memungkinkan Indonesia menjaga otonomi strategis di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Indonesia memandang bahwa keterlibatan konstruktif dengan seluruh kekuatan besar lebih menguntungkan dibandingkan memilih keberpihakan

pada blok tertentu. Pendekatan ini mencerminkan kesinambungan gagasan Soekarno mengenai kemandirian bangsa dalam menentukan arah politik luar negerinya (Anwar, 2020).

Penelitian oleh Muhammad Zulfikar Rakhmat dan koleganya juga menunjukkan bahwa strategi *hedging* Indonesia dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok merupakan manifestasi modern dari prinsip bebas aktif yang telah berkembang sejak era Soekarno (Rakhmat & Haryo, 2022).

2. Penguatan Diplomasi Global South: Indonesia sebagai Jembatan antara Negara Maju dan Berkembang

Soekarno menempatkan solidaritas Asia-Afrika sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara pascakolonial dalam sistem internasional. Gagasan tersebut masih terlihat dalam diplomasi Indonesia melalui perannya dalam kelompok negara berkembang seperti G77, Non-Aligned Movement, dan G20.

Penelitian oleh Rizal Sukma menjelaskan bahwa Indonesia berupaya memainkan peran sebagai *bridge builder* atau pembangun jembatan antara negara maju dan negara berkembang. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia memperjuangkan kepentingan *Global South* sekaligus menjaga hubungan konstruktif dengan negara-negara industri maju (Sukma, 2011).

Lebih lanjut, studi oleh Amitav Acharya menunjukkan bahwa warisan Bandung Conference tetap menjadi salah satu fondasi penting bagi kerja sama *Global South* dan pembentukan tata hubungan internasional yang lebih inklusif (Acharya, 2016).

3. Reformasi Tata Kelola Global: Indonesia Aktif Memperjuangkan Reformasi PBB, IMF, dan Bank Dunia

Dalam pidato *To Build the World Anew*, Soekarno mengkritik struktur internasional yang dianggap tidak mencerminkan kepentingan negara-negara baru merdeka. Kritik tersebut masih relevan terhadap berbagai lembaga global yang dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan negara berkembang.

Penelitian oleh Jürgen Rüland menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten mendorong reformasi lembaga-lembaga global agar lebih demokratis dan representatif. Indonesia mendukung perluasan representasi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di *United Nations, International Monetary Fund, dan World Bank* (Rüland, 2017).

Kajian oleh Mely Caballero-Anthony juga menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, semakin aktif memperjuangkan reformasi tata kelola global agar mampu menjawab tantangan pembangunan dan ketimpangan internasional secara lebih adil (Caballero-Anthony, 2014).

4. **Diplomasi Perdamaian: Indonesia Memperkuat Perannya sebagai Mediator Konflik Internasional**

Salah satu gagasan utama Soekarno adalah pentingnya perdamaian dunia yang berlandaskan kesetaraan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengembangkan diplomasi perdamaian melalui keterlibatan dalam misi penjaga perdamaian dan mediasi konflik.

Menurut penelitian oleh Marty Natalegawa, diplomasi Indonesia selama beberapa dekade menunjukkan komitmen kuat terhadap penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan kerja sama multilateral. Pendekatan ini tercermin dalam keterlibatan Indonesia dalam berbagai upaya perdamaian

regional maupun global (Natalegawa, 2018).

Penelitian oleh Laksmana juga menunjukkan bahwa kontribusi Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian PBB merupakan bagian dari identitas internasional Indonesia sebagai *middle power* yang mengedepankan stabilitas dan perdamaian internasional (Laksmana, 2017).

5. **Kepemimpinan dalam Isu Global: Perubahan Iklim, Keamanan Pangan, dan Pembangunan Berkelanjutan**

Pemikiran Soekarno tentang keadilan global dapat diterjemahkan ke dalam kepemimpinan Indonesia dalam berbagai isu transnasional yang memengaruhi negara berkembang. Saat ini, tantangan global tidak lagi terbatas pada kolonialisme politik, tetapi juga mencakup perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian oleh Dewi Fortuna Anwar menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin normatif dalam isu-isu global melalui diplomasi multilateral dan kerja sama Selatan-Selatan (Anwar, 2022). Peran Indonesia dalam forum G20 menunjukkan upaya untuk menghubungkan agenda pembangunan negara berkembang dengan tata kelola global.

Selain itu, studi oleh Dirk Messner menegaskan bahwa negara-negara berkembang yang memiliki posisi strategis seperti Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membangun konsensus global mengenai transisi energi, ketahanan pangan, dan pencapaian *United Nations Sustainable Development Goals* (Messner, 2019).

Gagasan Soekarno dalam *To Build the World Anew* sebagai Solusi atas Krisis Geopolitik Global Kontemporer

Pidato *To Build the World Anew* yang disampaikan oleh Soekarno di Sidang Umum PBB pada 30 September 1960 merupakan salah satu kontribusi intelektual Indonesia dalam wacana hubungan internasional. Dalam pidato tersebut, Soekarno mengkritik tata dunia yang dibangun atas dasar dominasi kekuatan besar, kolonialisme, dan ketidakadilan global. Ia menawarkan visi pembangunan tatanan dunia baru yang berlandaskan kemerdekaan, kesetaraan bangsa-bangsa, keadilan sosial, dan perdamaian dunia. Meskipun lahir dalam konteks Perang Dingin, gagasan tersebut tetap relevan sebagai solusi normatif terhadap berbagai krisis geopolitik global kontemporer.

1. Mengatasi Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok melalui Prinsip Non-Blok dan Otonomi Strategis

Salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas global saat ini adalah rivalitas strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan tersebut tidak hanya berlangsung dalam bidang militer, tetapi juga mencakup ekonomi, teknologi, keamanan siber, dan pengaruh geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Banyak pengamat menilai bahwa dunia sedang memasuki bentuk baru kompetisi kekuatan besar yang memiliki karakteristik menyerupai Perang Dingin. Dalam situasi ini, negara-negara berkembang menghadapi tekanan untuk berpihak kepada salah satu kekuatan.

Soekarno menawarkan pendekatan berbeda melalui prinsip yang kemudian menjadi dasar Gerakan Non-Blok, yaitu menolak politik blok dan mempertahankan kemerdekaan dalam menentukan kebijakan luar negeri. Menurut Soekarno, negara-negara merdeka tidak boleh menjadi alat

kepentingan kekuatan besar, melainkan harus menjadi subjek aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Pendekatan ini relevan bagi negara-negara berkembang saat ini karena memungkinkan mereka menjaga otonomi strategis (*strategic autonomy*) tanpa harus terjebak dalam polarisasi global. Konsep tersebut sejalan dengan praktik politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang hingga kini menjadi instrumen penting dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar. (Acharya, 2014; Anwar, 2020).

2. Menjawab Ketimpangan Global melalui Keadilan Internasional

Dalam pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa konflik internasional tidak hanya bersumber dari pertentangan ideologi, tetapi juga dari ketidakadilan ekonomi global. Ia mengkritik sistem internasional yang memungkinkan sebagian kecil negara menikmati kemakmuran, sementara sebagian besar negara lainnya tetap berada dalam kemiskinan dan ketergantungan.

Pandangan tersebut masih relevan karena ketimpangan ekonomi global tetap menjadi salah satu sumber instabilitas internasional. Meskipun globalisasi telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia, distribusi manfaat globalisasi masih sangat tidak merata. Negara-negara berkembang sering menghadapi hambatan dalam akses teknologi, investasi, perdagangan, dan pembiayaan pembangunan. Dalam konteks ini, gagasan Soekarno mengenai keadilan internasional dapat menjadi dasar normatif untuk mendorong reformasi tata ekonomi global agar lebih inklusif dan berkeadilan (Hurrell, 2007; Siddiqui, 2025).

3. Memperkuat Solidaritas Global South

Salah satu pokok pikiran utama Soekarno adalah pentingnya solidaritas

bangsa-bangsa yang pernah mengalami kolonialisme. Pemikiran tersebut pertama kali diwujudkan melalui Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok.

Dalam konteks kontemporer, kebangkitan Global South melalui forum seperti BRICS menunjukkan bahwa negara-negara berkembang semakin berupaya memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional. Namun, Soekarno tidak memandang solidaritas semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan kekuatan ekonomi, melainkan sebagai sarana memperjuangkan keadilan global dan kesetaraan antarbangsa. Oleh karena itu, semangat Bandung yang diwariskan Soekarno masih relevan sebagai fondasi moral dan politik bagi kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi ketimpangan global (Lumumba-Kasongo, 2015; Umar et al., 2025).

4. Reformasi Tata Kelola Global

Soekarno mengkritik struktur tata dunia yang menurutnya tidak mencerminkan kepentingan mayoritas umat manusia. Kritik tersebut masih relevan karena hingga kini berbagai lembaga internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, masih didominasi oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II.

Ketimpangan representasi dalam lembaga internasional menyebabkan banyak negara berkembang merasa tidak memiliki pengaruh yang memadai dalam proses pengambilan keputusan global. Oleh karena itu, gagasan Soekarno mengenai pembangunan tata dunia baru dapat dipahami sebagai seruan untuk mereformasi tata kelola global agar lebih demokratis, representatif, dan inklusif. Reformasi tersebut menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan global

seperti perubahan iklim, keamanan pangan, pandemi, dan konflik internasional yang membutuhkan kerja sama lintas negara (Hurrell, 2007; Acharya & Buzan, 2019).

5. Penyelesaian Konflik melalui Dialog dan Perdamaian

Soekarno meyakini bahwa perdamaian tidak dapat dicapai melalui dominasi militer atau keseimbangan kekuatan semata. Menurutnya, perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap kedaulatan negara, kerja sama internasional, dan penyelesaian sengketa secara damai.

Gagasan tersebut sangat relevan dalam menghadapi berbagai konflik kontemporer seperti perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, dan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Ketergantungan pada pendekatan militer sering kali memperpanjang konflik dan memperburuk krisis kemanusiaan. Sebaliknya, pendekatan dialogis yang diusulkan Soekarno menawarkan jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan (Wendt, 1999; Jackson & Sørensen, 2016).

6. Geopolitik Pancasila sebagai Alternatif terhadap Politik Kekuatan

Dalam perspektif yang lebih luas, gagasan Soekarno dapat dikembangkan menjadi konsep Geopolitik Pancasila, yaitu pendekatan geopolitik yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan perdamaian dunia. Berbeda dengan paradigma realisme yang menempatkan kekuatan sebagai faktor utama dalam hubungan internasional, Geopolitik Pancasila menempatkan kesejahteraan manusia dan keadilan global sebagai tujuan utama.

Konsep ini memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan

global kontemporer seperti perubahan iklim, krisis energi, migrasi internasional, dan ketimpangan pembangunan. Tantangan-tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kompetisi kekuatan semata, melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang berlandaskan prinsip solidaritas dan tanggung jawab bersama (Yani & Montratama, 2018; Acharya, 2014).

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan Soekarno dalam pidato *To Build the World Anew* yang disampaikan pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1960 masih memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi krisis geopolitik global kontemporer. Meskipun lahir dalam konteks Perang Dingin, substansi pemikiran yang terkandung dalam pidato tersebut tetap aktual untuk menjawab berbagai tantangan hubungan internasional abad ke-21.

Gagasan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang dikemukakan Soekarno masih relevan karena berbagai bentuk dominasi global saat ini tidak lagi diwujudkan melalui penjajahan teritorial, melainkan melalui ketergantungan ekonomi, penguasaan teknologi, dominasi finansial, dan pengaruh politik global. Dalam konteks tersebut, konsep neo-kolonialisme yang pernah dikritik Soekarno masih dapat digunakan untuk memahami relasi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang.

Selain itu, prinsip kesetaraan kedaulatan negara yang diperjuangkan Soekarno juga tetap menjadi isu sentral dalam tata kelola global. Struktur kelembagaan internasional yang masih didominasi oleh negara-negara besar menunjukkan bahwa cita-cita mengenai sistem internasional yang lebih demokratis dan inklusif belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, tuntutan

reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan internasional, dan berbagai institusi global lainnya mencerminkan keberlanjutan agenda yang pernah diperjuangkan Soekarno.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebangkitan *Global South* dan meningkatnya peran kelompok BRICS menunjukkan semakin relevannya gagasan solidaritas negara-negara berkembang yang menjadi salah satu pokok pemikiran utama Soekarno. Perkembangan tersebut menandai adanya pergeseran distribusi kekuatan global menuju sistem multipolar yang membuka peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan tata dunia baru. Dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, prinsip politik luar negeri bebas aktif yang berakar pada pemikiran Soekarno tetap menjadi strategi yang relevan bagi Indonesia. Politik bebas aktif memungkinkan Indonesia mempertahankan independensi kebijakan luar negeri sekaligus berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian dunia.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidato *To Build the World Anew* bukan sekadar dokumen historis, melainkan sumber pemikiran geopolitik yang masih relevan dalam menghadapi dinamika global kontemporer. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi landasan normatif dan konseptual bagi Indonesia dalam memperkuat peran diplomatiknya di tengah transformasi menuju tatanan dunia multipolar.

PUSTAKA ACUAN

- Acharya, A. (2014). *The End of American World Order*. Polity Press.
- Acharya, A. (2016). *Studying the Bandung Conference from a Global IR*

- Perspective*. Australian Journal of International Affairs, 70(4), 342–357.
- Acharya, A., & Buzan, B. (2019). *The Making of Global International Relations*. Cambridge University Press.
- Anwar, D. F. (2020). *Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. CSIS Indonesia.
- Anwar, D. F. (2020). *Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. International Affairs.
- Anwar, D. F. (2022). *Indonesia's Leadership in Global Governance and South-South Cooperation*. Contemporary Southeast Asia.
- Caballero-Anthony, M. (2014). *Understanding Global Governance and its Challenges*. Asian Perspective.
- Hurrell, A. (2007). *On Global Order: Power, Values and the Constitution of International Society*. Oxford University Press.
- Indrayani, I., Umar, H., & Mellaz, A. (2020). *Indonesia's Foreign Policy During Soekarno Era 1945–1965: Orientation Shift from Diplomacy to Confrontation*. Journal of Social Political Sciences.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2016). *Introduction to International Relations* (6th ed.). Oxford University Press.
- Laksmana, E. A. (2017). *Indonesia's Rising Regional and Global Profile*. Contemporary Southeast Asia.
- Lumumba-Kasongo, T. (2015). Rethinking the Bandung Conference in an Era of Unipolar Liberal Globalization and Movements Toward a Multipolar Politics. *Global South Studies*, 2(9), 1–21.
- Natalegawa, M. (2018). *Indonesia's Foreign Policy and International Order*. Asia Policy.
- Rakhmat, M. Z., & Haryo, A. (2022). *Indonesia's Hedging Strategy amid US-China Rivalry*. Asian Affairs.
- Rüland, J. (2017). *Indonesia and the Reform of Global Governance*. The Pacific Review.
- Siddiqui, K. (2025). Decolonisation and Economic Sovereignty: The Bandung Conference and the Making of the Global South.
- Soekarno. (1960). *To Build the World Anew*. Address Before the Fifteenth Session of the United Nations General Assembly.
- Umar, A. R. M., Yuana, S. L., Hakim, L., & Mas'oed, M. (2025). Bandung Conference 70 Years On: Visions of Decolonisation for a Multipolar World Order.
- Vasileiou, A. (2025). *An Anatomy of Worldmaking: Sukarno and Anticolonialism from Post-Bandung Indonesia*. American Journal of Political Science.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Wijanarko, N. B. (2025). *Imagining A New World: Soekarno's Speeches 1958–1965*. Journal of Indonesian History.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). *Pengantar Studi Geopolitik Indonesia*. Rajawali Pers.
- Yeremia, A. E. (2020). *Sukarno and Colonialism: An Analysis of Indonesia's Foreign Policy Discourse, 1955–1961*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional.